

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN
PENGGELONDONG DALAM PENGOLAHAN EMAS
(Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh :

**Anita Mawarni
NPM : 1721030013**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN
PENGGELOMONG DALAM PENGOLAHAN EMAS
(Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Anita Mawarni
NPM : 1721030013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing Akademik I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
Pembimbing Akademik II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi sasaran penelitian terletak di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini dengan mengamati para penggondong emas di Dusun Teluk Harapan Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, mengenai bagaimana pemilik batu melaksanakan sistem pemberian upah terhadap penggondong emas. Berdasarkan penelitian, sistem pengupahan yang dilakukan adalah berupa kepemilikan lumpur hasil gilingan batu emas tersebut yang didalamnya terdapat kadar emas. Emas yang terdapat didalam lumpur inilah yang menjadi upah penggondong. Namun, setiap karung batu lumpurnya memiliki kandungan emas yang tidak menentu hasilnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pengupahan penggondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan penggondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pengupahan penggondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan mengetahui dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan penggondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail terhadap sesuatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif. Metode berpikir induktif yaitu menggunakan analisis yang dilakukan dengan mempelajari suatu gejala atau kaidah-kaidah dilapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dilokasi penelitian.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa sistem pengupahan yang dilakukan oleh penggondong emas dan pemilik batu di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan adat kebiasaan masyarakat setempat. Dalam pemberian upahnya terdapat ketidak pastian kandungan kadar emas dilumpur tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap sistem upah pada usaha pertambangan ini jika dikaitkan dengan konsep muamalah tidak sesuai dengan ajaran Islam karena masih terdapat ketidak jelasan hasil emas yang terdapat didalam lumpur tersebut yang menyebabkan obyek dari upah tersebut belum jelas. Sehingga ini bertentangan dengan syarat-syarat upah sesuai dengan syari'at Islam yaitu objek upah haruslah jelas hasilnya yang akan didapat oleh penggondong emas. Dengan adanya kejelasan obyek ini maka kemaslahatan yang didapat lebih banyak dari kemudharatannya.

PERNYATAAN ORINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita Mawarni
NPM : 1721030013
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Syari'ah : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong dalam Pengolahan Emas (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Maret 2021
Penulis



Anita Mawarni
NPM. 1721030013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : "Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)".
Nama : Anita Mawarni
NPM : 1721030013
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II


Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN PENGGELODONG DALAM PENGOLAHAN EMAS (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)"**. Disusun oleh **Anita Mawarni, NPM. 1721030013**, prodi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** Telah di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : M. Dani Fariz Amrullah, M.H.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III : Helma Maralisa, S.E.I., M.E.Sy.



DEKAN
Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas mengenai pokok bahasan, maka perlu penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dengan makna atau definisi yang terdapat didalamnya, guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami arti yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”.

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), perbuatan meninjau.¹

Hukum Islam adalah aturan yang diadakan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist yang diberikan kepada manusia untuk dijadikan sebagai jalan agar manusia berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan.²

Sistem Pengupahan adalah kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja para pekerja.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 5.

³ Guru Pendidikan, *Pengertian Sistem Upah, Macam, teori dan Faktor*, 2021, <https://www.gurupendidikan.co.id>.

Penggelondong merupakan panggilan kepada pekerja atau orang yang memiliki alat pengolahan emas dan dapat diartikan sebagai penggiling. Penggiling adalah orang yang menggiling.⁴ Atau dapat dikatakan sebagai orang yang mempunyai alat giling dan melakukan penggilingan dengan alat giling tersebut.

Pengolahan Emas merupakan proses pembuatan emas yang diawali dengan menggali lubang tambang yang mengandung emas. Penggalian batu emas dilakukan menggunakan palu atau pahat, kemudian batuan atau biji emas dapat diangkut ke permukaan bumi menggunakan bak yang ditarik dengan katrol. Batuan atau biji emas penambangan kemudian diolah menggunakan gelondong sehingga emas terpisahkan dari batu dan meninggalkan lumpur.⁵

Berdasarkan istilah-istilah yang telah dijelaskan diatas dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu untuk meninjau pandangan hukum Islam terkait sistem pengupahan penggelondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pasti saling berinteraksi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu bekerja sangat penting kaitannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hubungan kerja sendiri, pihak yang berperan sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga akan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) Online. 23 Juni 2020, 22.12 WIB, <https://kbbi.web.id/giling>

⁵ Eko Sulistiyono, et. Al. *Potensi Pemanfaatan Pengolahan emas Proses Heap Leaching*, p-ISSN : 2407-1846. e-ISSN : 2460-8416, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016): 2, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/819>

memperoleh upah. Upah dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang asing karena manusia membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upah menurut bahasa (etimologi) berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan, menurut istilah (terminologi) upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.⁶ Dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasannya Setiap pekerja/ buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁷ Artinya, upah yang diberikan harus layak dan sesuai kinerjanya tanpa merugikan pihak yang lain.

Pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dari ketentuan hukum Islam. Seperti adanya ketidak jelasannya objek yang diberikan. Dalam suatu akad perjanjian bisa dikatakan sah karena adanya rukun yang terpenuhi yaitu unsur *sighat*. *Sighat* merupakan rukun pada akad yang merupakan kejelasan dari objek akad maupun bagi hasil dalam suatu usaha.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188)

⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya: Gemiang Publisher, 2018), 141.

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (1)

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat. Islam dalam melaksanakan akad perjanjian tidak boleh disertai unsur *gharar*. *Gharar* sendiri menurut Ibn Taimiyah mempunyai banyak pengertian, antara lain: Pertama, sesuatu yang tersembunyi baik akibatnya, rahasianya, atau segala sesuatunya. Kedua, sesuatu yang tidak jelas antara mulus atau cacatnya sehingga dengan demikian maksud dari diadakannya akad bisa tercapai atau tidak.⁸

Akad dalam perjanjian upah mengupah harus jelas dan pasti. Artinya, tidak disertai dengan unsur *gharar* didalam perjanjian upah mengupah. Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab yang tidak dapat ditentukan adalah dilarang. Karena mengandung resiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi resiko. Tentu saja resiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. *Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*nya hukumnya tidak diperbolehkan.⁹

⁸ Achmad Hijri Lidinillah, *Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, JESTT, Vol. 2 (2015): 110, <https://ejournal.uinair.ac.id/JESTT/article/view/556>.

⁹ Efa Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XXI No. 3 (2015): 656, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.

Belakangan ini banyak masyarakat di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang membuka penggelondongan emas dikarenakan telah ditemukan lahan yang diduga memiliki kadar emas didalamnya. Hal ini berdampak terhadap perekonomian warga terutama warga yang sebelumnya adalah pengangguran. Adanya pertambangan emas ini dijadikan kesempatan oleh mereka untuk membuka usaha berupa jasa penggelondongan emas, dan tidak sedikit yang terbukti bahwa dari usaha gelondong emas ini membuahkan hasil yang membuat perekonomian warga perlahan membaik.

Emas merupakan logam mulia yang identik warnanya adalah berwarna kuning. Saat ini, emas memiliki daya jual yang cukup tinggi dan banyak diminati oleh semua kalangan. Sehingga usaha ini banyak diminati oleh warga Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti mengatakan hal ini karena memang benar bahwa banyak masyarakat yang telah membuka usaha gelondong emas dan membuahkan hasil.

Usaha gelondong emas bisa dikatakan usaha yang banyak diminati warga setempat. Namun, setelah diteliti terdapat kejanggalan dalam sistem pemberian upah kepada penggelondong emas oleh pemilik batu. Upah yang diberikan pemilik batu kepada penggelondong emas yakni dengan sistem bagi hasil, dimana lumpur hasil gilingan batu emas menjadi milik penggelondong. Lumpur tersebut masih memiliki kadar emas sehingga ini menjadi upah penggelondong. Namun, ketika emas yang dihasilkan sedikit, maka akan

berpengaruh terhadap kandungan emas yang terdapat di lumpur sehingga ini menimbulkan ketidakpastian hasil yang diterima oleh penggelondong emas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ini menjadi alasan peneliti untuk mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)” yang membahas utamanya mengenai adanya ketidakpastian hasil dari pengupahan penggelondong dalam pengolahan emas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka perlu adanya sebuah pengarah masalah yang mendalam dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis memandang penting membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar pembahasannya konsisten dan tidak melebar dari fokus kajian yang diteliti, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan yang diberikan kepada penggelondong oleh pemilik batu dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan penggelondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari penulis yang menjadi pendorong untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem dari pengupahan yang diberikan kepada penggelondong dalam pengolahan emas oleh pemilik batu di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan penggelondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan dan masukan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam hal upah mengupah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini dapat dijadikan ajang berfikir secara ilmiah untuk dapat memahami tentang bagaimana cara atau sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Penelitian ini merupakan syarat bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan dapat menambah wawasan dalam memahami dengan baik dan benar mengenai upah mengupah dalam tinjauan hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan) yang telah diteliti oleh Utari Nur Permadi (2019) dari UIN Raden Intan Lampung.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut antara lain: bagaimana sistem pelaksanaan upah mengupah di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang upah mengupah di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.¹⁰ Hasil dari penelitian yang telah dijelaskan dalam skripsi tersebut dapat disimpulkan Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh yang terdapat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan menggunakan sistem pembayaran upah setelah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa sudah berakhir. Prakteknya mereka tidak melakukan akad upah mengupah yang jelas terlebih seperti tidak jelas nominal upah dan tidak adanya kesepakatan hak-hak dan kewajiban yang jelas dalam prakteknya. Sistem upah mengupah seperti ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dalam syara’ atau hukum Islam sebab

¹⁰ Utari Nur Permadi, *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan way Panji Lampung Selatan)*, (Skripsi, UIN Raden Intan lampung, 2019), 7.

tidak memenuhi syarat Ijarah yang mengharuskan mengetahui upah di awal.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” yang telah diteliti oleh Siti Aminang (2019) dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut antara lain: bagaimana pelaksanaan pembayaran upah pengupasan pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Lampung Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah pengupasan pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Tanjung Jabung Timur.¹¹ Hasil yang telah dijelaskan dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh pengupas pinang yang terjadi di Desa Sungai Beras adalah dengan sistem pembayaran berupa uang bukan barang. Hal ini didasarkan pada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah terjadi kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran upah ini adalah dibenarkan dalam Islam karena disertai dengan adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Oleh Pemilik Usaha Kepada Pekerja (Studi Kasus

¹¹ Siti Aminang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi*, (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 4.

Usaha Batu Batako Wulan Rizki Di Kecamatan Waikabuba Kabupaten Sumba Barat NTT)” yang telah diteliti oleh Sri Wahyuni Dahlan (2019) dari UIN Mataram.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian tersebut antara lain: bagaimana sistem upah pekerja batu batako Usaha Wulan Rizki di Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah pekerja batu batako Usaha Wulan Rizki di Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat.¹² Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah oleh pemilik usaha terhadap pekerja yang terjadi di Usaha Batu Batako Wulan Rizki Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat terhadap pekerja pencetakan cenderung sering berubah-ubah dikarenakan sewaktu-waktu pemilik usaha harus bergantung pada tinggi dan rendahnya tingkat pemasaran. Sedangkan pembayaran upah terhadap buruh pengangkut batu batako tidaklah bergantung pada pemasaran batu batako, akan tetapi buruh pengangkut di upah sesuai dengan berapa ember yang diangkut dan satu ember di upah dengan harga seribu rupiah. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah oleh pemilik usaha kepada pekerja usaha batu batako Wulan Rizki di Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, tidak dibenarkan untuk merubah-rubah sistem pengupahan yang sudah disepakati bersama di awal perjanjian sebelum melakukan pekerjaan.

¹² Sri Wahyuni Dahlan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Oleh Pemilik Usaha Kepada Pekerja (Studi Kasus Usaha Batu Batako Wulan Rizki di Kecamatan Waikabuba Kabupaten Sumba Barat NTT)*, (Skripsi, UIN Mataram, 2019), 5.

Berdasarkan beberapa hasil karya ilmiah di atas, penulis mengamati serta menelusuri kajian pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang sistem pengupahan penggelandong dalam pengolahan emas belum ada yang mengkaji. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelandong Dalam Pengolahan Emas (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden.¹³

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang terdapat di lapangan yang dalam hal ini, penulis melakukan penelitian mengenai sistem pengupahan penggelandong dalam pengolahan emas di tempat penggelandongan emas yang terletak di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat yang menjadi objek, gejala, keadaan atau

¹³ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

kelompok tertentu.¹⁴ Dalam penelitian ini kaitannya adalah menggambarkan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Data dan Sumber Data

Fokus dari penelitian ini adalah mengarah terhadap persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas dan faktor yang melatarbelakangi persoalan tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁵ Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi objek penelitian masyarakat yang memiliki usaha gelondong emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang menunjang dan membicarakan pembahasan serta persoalan yang berkaitan dengan judul dan pokok bahasan dalam judul skripsi ini. Seperti buku Fiqh Muamalah, Jurnal, Undang-Undang dan yang lainnya.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 30.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi, populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik maupun sifat yang ada pada subyek atau obyek tersebut.¹⁶

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 60 orang dari 14 tempat penggondongan batu emas yang terdiri dari 14 pemilik gondong emas, 45 pekerja yang memegang mesin gondong, dimana setiap penggondongannya terdiri dari 4 sampai 5 pekerja dan juga 1 orang pemilik batu.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diselidiki. Bila populasi bagi peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti semua yang terdapat dipopulasi baik dari segi keterbatasan dana, tenaga ataupun waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang sebagai pemilik gondong dan 5 karyawan yang memegang mesin gondong dan 1 orang pemilik batu.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&d)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 80.

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang teknik pengumpulan sampelnya berdasarkan pertimbangan tertentu. Artinya, sampel dilakukan terhadap orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi dapat diartikan juga sebagai adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin tercapai. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.¹⁷

Terdapat lima metode observasi yang umum dikenal dan sering kali digunakan dalam penelitian, antara lain:¹⁸

- 1) *Anecdotal record*, metode yang digunakan peneliti melakukan observasi dengan hanya membawa kertas kosong untuk mencatat perilaku yang khas, unik dan penting yang dilakukan subjek penelitian.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 133-141.

- 2) *Behavioral Checklist*, merupakan suatu metode dalam observasi yang mampu memberikan keterangan mengenai muncul atau tidaknya perilaku yang diobservasi.
- 3) *Participation Charts*, tujuan dari metode ini adalah melihat seberapa banyak atau seberapa sering keterlibatan (partisipasi) atau keaktifan dari setiap objek yang diobservasi pada waktu yang sama.
- 4) *Rating Scale*, tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dari perilaku yang diteliti.
- 5) *Behavioral Tallying dan Charting*, metode ini mampu menguantifikasikan perilaku yang muncul dalam rentang waktu yang ditentukan.

Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah *Anecdotal Record* yang dilakukan peneliti dengan membawa kertas kosong untuk mencatat perilaku yang khas, unik dan penting guna mengamati dan meneliti mengenai sistem pengupahan penggelondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data didapat melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Golden juga mendefinisikan tentang wawancara, menurut Golden wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

Pada umumnya, wawancara dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga bentuk, antara lain:¹⁹

- 1) Wawancara terstruktur lebih terlihat seperti interogasi dan proses wawancaranya harus sesuai mungkin dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
- 2) Wawancara semi-terstruktur dikatakan wawancara yang fleksibel tetapi tetap terkontrol. Artinya, pertanyaan dan jawaban tergantung situasi-kondisi serta alur pembicaraan, tetapi masih ada kontrol yang dipegang yaitu tema wawancara.
- 3) Wawancara tidak terstruktur, pertanyaannya sangat terbuka dan jawabannya lebih bervariasi, pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur pembicaraan.

Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang dilakukan adalah semi-terstruktur yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan menanyakan secara langsung kepada penggelondong emas mengenai sistem pengupahan penggelondong dalam pengolahan emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 142.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat ataupun menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri ataupun oleh orang lain tentang subjek.²⁰

Metode ini digunakan peneliti sebagai metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Data dari dokumentasi ini merupakan pelengkap dari data yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk mengetahui data-data mengenai gambaran umum Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan proses penggelondongan batu emas yang ada di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara, antara lain:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara meneliti ulang data yang telah diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti lakukan adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara dan observasi penelitian dengan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.

²⁰ Ibid., 143.

b. Sistematika Data

Sistematika data merupakan cara penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²¹

Dalam menarik kesimpulan di akhir penelitian ini, maka yang digunakan adalah menarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Induktif itu sendiri adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang atau kaidah-kaidah lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.²² Maka dari itu, metode ini sangat berkaitan dengan penelitian ini yang dalamnya membahas tentang sistem pengupahan penggelondong dalam pengolahan emas yang kemudian nantinya peneliti akan mendapat pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan beberapa sub bab didalamnya. Supaya mendapat arah serta gambaran dari hal yang tertulis, berikut ini sistematikanya secara lengkap:

1. Bab I Pendahuluan

²¹ De Lexy. J. Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), 205.

²² Susiadi, *Metode penelitian*, 4.

Dalam bab ini berisikan mengenai pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini.

2. Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum Islam tentang upah mengupah. Maka dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian upah mengupah, dasar hukum upah mengupah, rukun dan syarat upah mengupah, prinsip upah mengupah dan macam-macam upah mengupah.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari daerah tempat penelitian yaitu Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan serta menjelaskan tentang Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas di Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pembahasan yang berasal dari hasil pengumpulan berbagai data dan analisa mengenai hasil tersebut. Penulis menyesuaikan dengan rumusan masalah serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bab V Penutup

Dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan diisi dengan menyajikan secara ringkas padat dan jelas mengenai seluruh hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini. Rekomendasi merumuskan berdasarkan hasil dari penelitian yang bersi uraian mengenai langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak terkait berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah Mengupah

Upah mengupah dalam bahasa Arab disebut dengan “*Ijarah*”. *Al-Ijarah* merupakan mashdar dari kata “*Al-Ajru*” yang berarti *Al-Iwadh* (ganti). Dan oleh sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* atau upah.¹ Secara terminologi terdapat beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh, antara lain:

Ulama Syafi’iyah mengemukakan pendapat bahwa *ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan memperbolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

¹ Wasiatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Madura: Duta Media Publishing, 2019), 126.

² Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik* (Jepara: UNINSU PRESS, 2019), 71.

³ Ibid.

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Sayid Sabiq juga berpendapat *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Menurut Hasbie Ash-Shiddiqie *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁴

Menurut Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, oleh karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.

Adapun dalam Undang-Undang dijelaskan pada pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah menjelaskan upah adalah suatu penerimaan sebagai

⁴ Miko Polindi, *Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah, dan Al-Adalah, Dalam Ijarah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlík (IMBT)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1 No. 1: 4, <https://media.neliti.com/288193-filosofi-dan-prinsip-tauhidul-0d273482>.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (30)

imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.⁶

Adapun dalam Fatwa DSN-MUI mendefinisikan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah adalah akad dalam sewa-menyewa antara pihak dengan catatan apabila objek transaksinya adalah barang, maka barang tersebut tidak ikut berpindah kepemilikan kepada pihak yang menyewa.⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* atau upah mengupah merupakan pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian yang disebut upah dengan jumlah tertentu. Selain itu, upah juga termasuk hak dari pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

B. Dasar Hukum Upah Mengupah

Dasar hukum upah mengupah atau *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 1.

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

1. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, al-Qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan sempurna. Diantara hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, pencatatan, penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya serta memudahkan untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum muslimin. Sebab apabila diturunkan secara sekaligus, akan menyulitkan dalam penghafalan, penulisan, penghayatan dan pengamalannya.⁸

Kegiatan upah mengupah juga telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijadikan sebagai dasar hukum, antara lain:

a. Qs. Al-Thalaq (65) ayat 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسُتْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

⁸ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 9.

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S. At-Thalaq ayat 6)

Maksud dari ayat di atas adalah kepada mereka (istrimu) yang telah menyusui anak-anakmu, maka berikanlah upah karena telah menyusui untuk mereka yaitu anak-anakmu dengan cara yang baik sampai tercapai kesepakatan mengenai upah tersebut.

b. Qs. Al-Qhasas (28) ayat 26, yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ
ٱلْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qhasas ayat 26)

Maksud dari ayat di atas adalah dalam mencari seseorang atau pekerja untuk dipekerjakan haruslah yang memiliki sikap yang kuat dan amanah sehingga dapat diberikan upah layak kepadanya atas pekerjaan yang dilakukannya.

c. Qs. Az-Zukhruf (43) ayat 32, yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُدْحًا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Az-Zukhruf ayat 32)

Maksud dari ayat di atas adalah kehidupan dan rezeki manusia sudah ada ditangan Allah SWT dan telah memberi kelebihan dari sebagian hambanya agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperoleh upah darinya dengan memberikan pekerjaan.

d. Qs. At-Taubah (9) ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-Taubah ayat 105)

Maksud ayat di atas adalah perihal pertanggungjawaban atas setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat muslim. Allah SWT telah memberikan ancaman kepada umat muslim yang melakukan

perselisihan atas apa yang telah diperintahkan-Nya dan semua yang diperbuat akan diketahui di hadapan umat muslim lainnya pada hari kiamat.

2. Hadis

Hadis menurut bahasa adalah *khabar* atau berita. Menurut istilah, Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam atau membenarkannya (*taqrir*).

Para ulama Hadist telah memeriksa dan mengkategorikan hadist kedalam 2 bagian, antara lain:

- a. *Hadist Shahih*, yakni hadist yang telah diteliti dengan cermat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran beritanya dari Nabi SAW. Karena pembawa beritanya (*sanad*) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan hafalannya, kaitan *sanad*-nya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
- b. *Hadist Dha'if*, yakni Hadist yang telah diteliti dengan cermat ternyata mengandung kelemahan, baik dari segi pembawa beritanya (*sanad*) yang dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, anta lain *sanad*-nya terputus, atau isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.⁹

Hadist yang menjadi landasan hukum setelah Al-Qur'an dalam kegiatan upah mengupah antara lain:

⁹ Ibid.

عَنْ سَعْدِ بْنِ وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْافِي مِنْ لَزْزَعٍ فَنهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِذَهَبٍ أَوْوَرَقٍ (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: "Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang mendapat banyak air. Maka Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak." (H.R Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i).¹⁰

Maksud dari Hadis di atas adalah pembayaran sewa tanah harus dengan menggunakan mata uang yang pada zaman dahulu berupa emas atau perak, bukan dengan tanaman yang tumbuh.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا إِلَّا جِيرًا جَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْفُهُ (راوه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering". (HR Ibnu Majah, shahih)¹¹.

Maksud dari Hadis di atas adalah janganlah menunda-nunda dalam membayar upah, setelah pekerja menjalankan kewajibannya, maka berilah dia upah.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَرَ حُجَّامٍ فَقَالَ : اجْتَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَجْمَهُ أَبُو طَيِّبَةٍ وَاعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: "Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah, dan belia memberinya imbalan sebanyak dua Sha' makanan". (HR. Bukhari)¹²

¹⁰ Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271

¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 2227 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), 152.

¹² Imam Bukhori, *Shahih Bukhori Jilid 4* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2004), 407.

Maksud dari Hadis di atas adalah dalam Islam telah dijelaskan mengenai transaksi upah mengupah haruslah disebutkan secara jelas mengenai upah yang akan didapat oleh pekerja.

3. Ijma'

Ijma' menurut istilah ushul adalah sepakat para mujtahid Muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum syar'i, pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan pada semua Mujtahid diwaktu terjadinya. Para Mujtahid itu sepakat memutuskan atau menentukan hukumnya. Kesepakatan mereka itu dinamakan Ijma'. Ijma' mereka itu adalah suatu i'tibar terhadap suatu hukum. Menurut mereka ini adalah adil terhadap suatu masalah. Definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Karena selagi Rasulullah masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi sumber tasyri'. Tidak ada penggambaran perbedaan pendapat dalam syar'i, dan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu baru ada, apabila lebih dari seseorang.¹³

Berdasarkan Ijma', para ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini. Jadi, jelas Allah SWT telah mensyariatkan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.

Berdasarkan nash al-Qur'an, Hadis dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwasannya hukum *ijarah* atau upah mengupah itu boleh

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: PT Aneka Rineka Cipta, 2012), 49.

dilakukan dalam Islam jika kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai syara'. Tujuan disyariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan dilain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya akan saling mendapatkan keuntungan.

C. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

Menurut Jumhur ulama yang menjadi rukun dalam upah mengupah adalah sebagai berikut:

1. Sighat Al-‘Aqd (ijab dan qabul)

Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.¹⁴

Sighat sendiri menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab qabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad.¹⁵

Shighat akad adalah setiap ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak akad. Karena keinginan pihak akad itu abstrak,

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 68-69.

¹⁵ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 27.

maka dalam fikih Islam keinginan ini harus diungkapkan dengan jelas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Oleh karena itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap shighat atau Ijab qabul, antara lain:

- a. Maksud shighat itu harus jelas dan bisa dipahami

Shighat harus menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi. Terutama dalam melakukan transaksi jual beli manfaat itu harus menggunakan lafadz ijarah atau setiap ungkapan yang menunjukkan jual beli manfaat dan seterusnya.

Shighat ijab dan qabul dapat diwujudkan dengan ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi modern, dan bahkan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak.¹⁶

¹⁶ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 29.

b. Adanya kesesuaian antara Ijab dan Qabul

Qabul menunjukkan maksud dari isi ijab, Ijab dan Qabul ini harus bersesuaian dimana salah satu pihak yang melakukan ijab atas objek akad tertentu maka qabul juga harus melakukan objek qabul tertentu tersebut. Jika qabul tidak menunjukkan objek qabul tersebut berbeda sighatnya maka menjadi batal.

c. Ijab dan Qabul dilakukan berturut-turut

Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu waktu dan salah satu pihak tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidak setujuan terhadap isi ijab. Antara ijab dan qabul harus muttashil (nyambung) yakni dilakukan dalam satu majlis'aqd (tempat kontak). Satu majlis akad adalah kondisi dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak.¹⁷

d. Keinginan akad pada saat itu

Maksud dari keinginan untuk melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu mendatang, ini sesuai dengan pendapat para ahli fikih bahwa janji untuk membeli itu bukan akad jual beli dan tidak menimbulkan akibat hukum jual beli.¹⁸

Ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, fasid. Apabila syarat-syarat keabsahan tidak terpenuhi, akad ini termasuk kedalam

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 31.

akad yang fasid dan tidak sah. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah “akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.”¹⁹

Gharar diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Unsur ini dilarang dalam Islam. Gharar atau disebut juga *taghriir* adalah sesuatu dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Gharar ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Ketidakpastian tersebut adalah terhadap barang yang menjadi obyek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Ketidakpastian atau ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal, antara lain:²⁰

- 1) Fisik barang tidak jelas
- 2) Sifat barang tidak jelas
- 3) Ukurannya tidak jelas
- 4) Barang bukan milik penjual
- 5) Barang yang tidak dapat diserahkan.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar-nya* itu hukumnya tidak diperbolehkan.²¹

¹⁹ Ibid., 100.

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 105.

²¹ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-kKidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam* (Depok: PT Grafindo Persada, 2017), 116.

2. Al-‘Aqidain (kedua orang yang bertransaksi)

Orang yang melakukan transaksi akad sewa menyewa atau upah mengupah disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.²²

3. Al-Ujrah (upah/sewa)

Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

4. Al-Manafi'(manfaat)

Dalam hal ini, manfaatnya harus diketahui secara jelas. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek dari *ijarah*.

Selain rukun *ijarah* atau *ujrah*, harus ada syarat yang dipenuhi dalam melakukan transaksi (akad) *ujrah*. Syarat-syarat *ujrah* sebagaimana yang ditulis Hasrun Haroen adalah:²³

1. Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 117.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Insan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2010), 279.

2. Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dan walinya.
3. Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat manfaat.
4. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.
5. Objek *ujrah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan oleh penyewa.
6. Objek *ujrah* itu sesuai yang dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
7. Objek *ujrah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
8. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

D. Prinsip Upah Mengupah

Dalam menentukan penetapan upah, Islam tidak memberikan penentuan secara terperinci, tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan makna terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal tersebut seperti prinsip keadilan, prinsip kelayakan, dan prinsip kebajikan.

1. Prinsip Keadilan

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal *majmu' fatawa* mengatakan “Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab, pada dasarnya harta seseorang muslim lain itu tidak halal, kecuali dipindahkan haknya dengan kerelaan hatinya.²⁴ Maka dari itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman. Hal yang termasuk dalam kezaliman adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu dan masih banyak lagi perbuatan dzalim lainnya.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 40.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 95.

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah ayat 8).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan upah kepada pekerja haruslah adil dan sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja guna memberikan keadilan bagi pihak pekerja jika merasa dirugikan.

Dalam prinsip keadilan ini berfungsi agar upah yang dibayar harus seimbang dengan jasa yang telah diberikan untuk memberikan takaran upah yang adil tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan juga perlu memperhatikan kebutuhan hidup yang berkenaan dengan keluarganya.

Adapun asas-asas hukum yang berkeadilan adalah:²⁶

- a. Korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pembentukan hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan. Moral tertinggi di Indonesia diukur dari penerapan nilai-nilai Pancasila dan hubungan Industrial. Pancasila merupakan ideologi Negara, pandangan hidup, bangsa Indonesiadan juga sumber hukum tertinggi.
- b. Hak atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir. Hubungan kerja akan berakhir setelah habis jangka waktu berlakunya atau ditetapkan oleh hukum, maka hak dan kewajiban akan berakhir setelah hubungan kerja berakhir.

²⁶ Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1 (2017): 87-90, <https://doi.org/10.22146/jmh.16677>.

- c. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas.

Komponen upah antara lain: upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Komponen upah akan menentukan perhitungan hak atau upah lainnya seperti upah lembur, uang pesangon dan premi asuransi. Upah pokok sendiri merupakan imbalan atas jasa pekerja, dan termasuk bagian terbesar dari komponen upah yang pasti akan dinikmati oleh seluruh pekerja secara rutin sepanjang hubungan kerja masih ada. Maka dari itu, upah pokok itu harus layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.

- d. Tidak boleh ada diskriminasi upah. Perbedaan upah untuk pekerjaan yang sejenis atau tingkatan pekerjaan yang sama atas dasar perbedaan kelamin, perbedaan warna kulit, agama, etnis, golongan politik adalah dilarang. Hak atas pekerjaan dan upah yang layak merupakan hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Selain itu, kebebasan untuk memilih pekerjaan juga berlaku untuk seluruh manusia. Diskriminasi upah dilarang karena sikap diskriminasi akan menimbulkan rasa cemburu, iri, dan tidak harmonisnya hubungan sesama orang yang mempunyai kesempatan yang sama. Norma perlindungan upah harus mencakup perlindungan kepada pekerja sektor formal dan informal, pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. Namun, cara melindunginya diperbolehkan berbeda-beda karena sifat hubungan kerjanya berbeda pula.

- e. Pemberian upah harus manusiawi, pemberian upah dalam hal ini maknanya adalah besarnya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja sebagai manusia yang punya hak asasi, yaitu hidup secara layak. Selain itu, proses pembayaran upah harus tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan karena upah ditunggu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- f. Pemerintah harus melindungi upah pekerja. Sebagai Negara hukum, pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus melindungi warganya terutama warga yang lemah yaitu: lemah kelangsungan hubungan kerja, lemah sosial ekonomi, serta lemah fisiknya. Untuk menghindari perbuatan semena-mena pihak yang kuat ekonominya, pemerintah sebagai penayom masyarakat harus dapat melakukan campur-tangan melalui regulasi ataupun kebijakan yang sifatnya menghindari upah dibawah standar kebutuhan manusia.
- g. Keseimbangan. Upah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan pengusaha.
- h. Adanya penghargaan untuk pekerja yang lebih produktif. Produktifitas kerja dapat diukur melalui hasil pekerjaan, baik melalui kualitas atau mutu kerja yang berkualitas, jumlah satuan pekerjaan yang melampaui standar, atau jumlah jam kerja yang melampaui standar, kedisiplinan dalam bekerja dan sebagainya.
- i. Transparansi dalam manajemen pengupahan. Manajemen upah yaitu kebijakan ekonomi perubahan dalam sistem pengupahan.

- j. Para pihak yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pihak lawan dikenakan sanksi.
- k. Hak prioritas atas upah. Artinya, pembayaran upah harus lebih didahulukan daripada kreditur lainnya. Tujuan dari prinsip ini adalah karena upah sangat ditunggu oleh pekerja untuk memenuhi rutinitas kebutuhan hidupnya
- l. Perlindungan upah yang diberikan oleh perundang-undangan adalah perlindungan minimal atau terendah. Artinya pengusaha diberi kewenangan untuk memberikan perlindungan upah lebih baik bagi pekerja dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.

2. Prinsip Kelayakan

Prinsip kelayakan sangat dibutuhkan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidupnya, sehingga pekerja mendapat kehidupan yang layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.²⁷ Jika terjadi penyimpangan dalam upah yang tidak sesuai dengan tenaga yang mereka berikan maka itu merupakan hal yang tidak layak untuk diterima pekerja yang telah memenuhi kewajibannya.

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.” (Q.S. Al-Jaatsiyah ayat 22)

²⁷ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Az Zarfah*, Vol. 9, No. 2 (2017): 191, <https://core.ac.uk/download.pdf>.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia akan mendapat balasan sesuai apa yang mereka kerjakan. Ayat ini telah menjamin kelayakan upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh pekerja tanpa pihak pekerja merasa dirugikan. Artinya upah yang diberikan harus ditentukan berdasarkan pekerjaannya dan tidak kurang dari yang seharusnya dibayarkan.

3. Prinsip Kebajikan

Prinsip kebajikan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Jika ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah, antara lain:

- a. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mandatkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁸

²⁸ Ibid.

E. Macam-Macam Upah Mengupah

Upah dibedakan menjadi dua yakni:

1. Upah yang sepadan (*Ujrah al mithli*)

Ujrah al mithli merupakan upah yang sepadan kerjanya dengan jenis dari pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja disaat pembelian jasa, maka dari itu untuk menentukan besaran upah dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa akan tetapi belum menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan sepadan dengan jenis pekerjaannya.²⁹

2. Upah yang disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah sejenis ini memiliki syarat yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan akad transaksi terhadap upah tersebut.³⁰ Dengan demikian, pihak *musja'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa mendapat yang lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu termasuk kedalam *ujrah al-muasamma*. Apabila belum disebutkan,

²⁹ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos 1999), 99.

³⁰ Alisa Sartika, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 29.

ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya termasuk kedalam *Ujrah al-mithli*.

Setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah, jenis-jenis upah pun sangat beragam, diantaranya adalah:

1. Upah atas ibadah³¹

Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa menjadi muazin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Menurut Mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar Al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada takarub kepada Allah.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dari tenaga yang diketahui pula.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 280.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

2. Mengupah ibu menyusui

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah bukan ibu kandungnya. Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah ibu inangnya. Upahnya boleh dengan upah tertentu atau dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. Ketidakjelasan dalam upah semacam ini tidak menimbulkan persengkataan, karena biasanya pengupah bermurah hati dan bersikap dermawan kepada inang demi kasih sayangnya kepada anak.

3. Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu. Imam Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan Al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang dianggap tidak konkret. Mazhab Maliki memperbolehkan dengan disesuaikan dengan tradisi yang berlaku.

4. Perburuhan

Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikerjakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan. Buruh dalam kajian ekonomi dianggap sebagai kaum yang lemah. Hal ini dikarenakan posisi buruh sangat lemah secara ekonomi, dimana kehidupannya sangat tergantung pada majikan (pemilik modal) yang bisa

saja memecat atau melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan tidak mampu membayar upah minimum yang ditetapkan pemerintah, bangkrut dan alasan lainnya. Islam bertujuan untuk membangun struktur sosial dimana setiap individu disatukan oleh hubungan persaudaraan dan kasih sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia. Persaudaraan ini bersifat universal dan tidak sempit.³²

Hal-hal yang penting dalam hubungan antara majikan dan buruh yaitu menempatkannya dalam hubungan yang tepat dan memberikan aturan bagi hubungan timbal balik keduanya untuk mewujudkan keadilan diantara mereka. Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan.³³ Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun didzalimi oleh buruh.³⁴

³² Isnaini Harahap, Marliyah, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), 72.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, 81.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syammil. 2005.

Imam Bukhori. *Shahih Bukhori Jilid 4*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah. 2004.

Imam, Nasa'iy. *Sunan Nasa'iy*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

Muhammad. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir. 2002.

B. Buku atau Literatur

Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Insan, Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2010.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.

Harahap, Isnaini, Marliyah, dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2015.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Ja'far, A Khumedi. *Hukum Perdata Islam Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang Publisher. 2018.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*. Jakarta: PT Aneka Rineka Cipta. 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.

- Meoloeng, De Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya. 2001.
- Mustofa, Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Rohmaniyah, Wasiatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Madura: Duta Media Publishing. 2019.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNINSU PRESS. 2019.
- Sahroni, Oni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Salim, M. Arskal. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos. 1999.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&d)*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Peraturan Desa Sidomekar No. 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Tahun 2019-2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (30)

D. Jurnal

- Aminang, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pengupasan Pinang di Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi*. Skripsi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.
- Hidayati, Ika Novi Nur, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Az Zarga'*, Vol. 9, No. 2 (2017): 191, <https://core.ac.uk/download.pdf>.
- Lidinillah, Achmad Hijri, *"Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara"*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, JESTT, Vol. 2 (2015): 110, <https://e-journal.uinair.ac.id/JESTT/article/view/556>.
- Nur, Efa Rodiah, *"Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnin Modern"*, *Jurnal Al-Adalah* Vol. XXI No. 3 (2015): 656, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.
- Polindi, Miko, *"Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhidullah, dan Al-Adalah, Dalam Ijarah, Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT)"*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1: 4, <https://media.neliti.com/288193-filosofi-dan-prinsip-tauhidul-0d273482>.
- Sulistiyono, Eko, et. AL. *Potensi Pemanfaatan Pengolahan emas Proses Heap Leaching*, p-ISSN : 2407-1846. e-ISSN : 2460-8416, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta (2016): h. 2, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/819>
- Dahlan, Sri Wahyuni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Oleh Pemilik Usaha Kepada Pekerja (Studi Kasus Usaha Batu Batako Wulan Rizki di Kecamatan Waikabuba Kabubaten Sumba Barat NTT)*. Skripsi. UIN Mataram. 2019.
- Permadi, Utari Nur. *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan way Panji Lampung Selatan)*. Skripsi. UIN Raden Intan lampung. 2019
- Sartika, Alisa. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2017.
- Yetniwati. *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan*, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1 (2017): 87-90, <https://doi.org/10.22146/jmh.16677>.

E. Sumber On-Line

Guru Pendidikan, *Pengertian Sistem Upah, Macam, teori dan Faktor*, 2021,
<https://www.gurupendidikan.co.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI) Online. 23 Juni 2020, 22.12 WIB,
<https://kbbi.web.id/giling>>

Wikipedia Bahasa Indonesia, “Emas”, 2020,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Emas>.

F. Wawancara dan Observasi

Agus. “Proses Penggelondongan Batu Emas”. *Wawancara*. November 29. 2020.

Aji. “Sistem pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas”. *Wawancara*. Desember 1. 2020.

Aripudin. “Proses Penggelondongan Batu Emas”. *Wawancara*. November 29. 2020.

Ayon. “Sistem pengupahan Penggelondong Dalam Pengolahan Emas”. *Wawancara*. Desember 1. 2020.

Azis. “Proses Pengambilan Batu Emas”. *Wawancara*. November 28. 2020.

Basri. “Proses Penggelondongan Batu Emas”. *Wawancara*. November 29. 2020.

Budi. “Sistem Pengupahan Penggelondong Dalam pengolahan Emas”, *Wawancara*. Desember 3. 2020.

Har. “Proses Penggelondongan Batu Emas”. *Wawancara*. November 29. 2020

Sholi. “Sistem pengupahan Penggelondong Dalam pengolahan Emas”. *Wawancara*. Desember 1. 2020.

Wan. “Proses Penggelondongan Batu Emas”. *Wawancara*. November 29. 2020.

Hasil Observasi. “Aktivitas Pertambangan Emas di Desa Sidomekar”. November 28. 2020.